

Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi

Disampaikan pada acara:
Webinar Series #6 GTRA Summit 2023
“Kolaborasi Tuntaskan Permasalahan Tanah Transmigrasi”

Jakarta, 6 Juli 2023

Ir. Dadat Dariatna, M.Si.
Direktur Landreform

Direktorat Jenderal Penataan Agraria
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

•
• •
• • •



• • • • • • • •
• • • • • • • •

REFORMA AGRARIA UNTUK RAKYAT INDONESIA



Presiden Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo, Ratas 29/05/2020

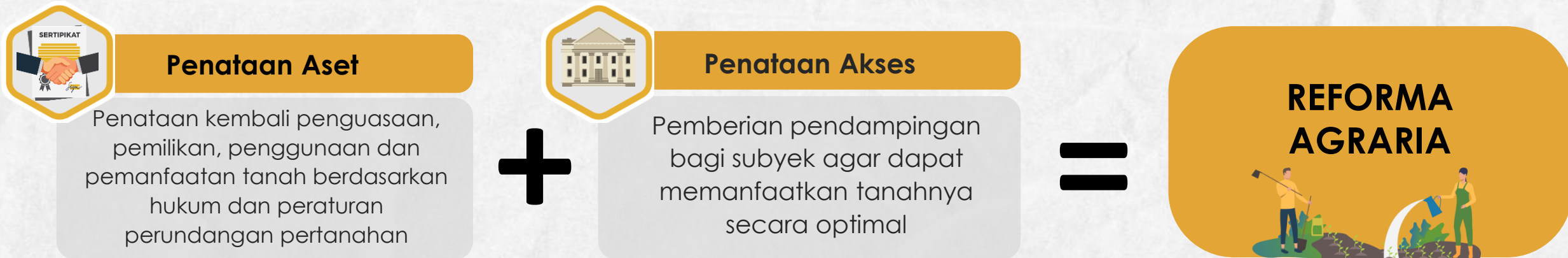
“Saya minta diprioritaskan percepatan Program Strategis Nasional yang **berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat**, misalnya: **Program Sertifikasi Tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, Reforma Agraria**, Perhutanan Sosial serta Peremajaan Perkebunan Rakyat. Saya ingin pastikan program prioritas ini tetap berjalan tetapi memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.”

#Keputusan Kepala Staf Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Agraria 2021

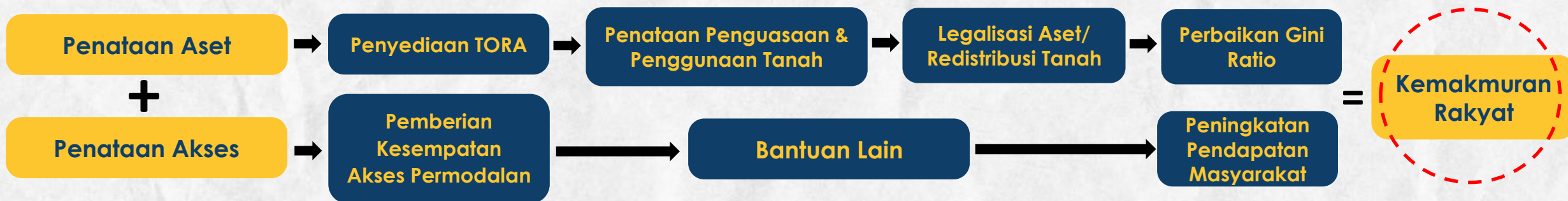
Pengantar Reforma Agraria

Reforma Agraria : Penataan Kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, berdasarkan

Pancasila, UUD 1945, UU 5/1960 (UUPA), TAP MPR RI No. IX/MPR/2001, UU 17/2007, Perpres 18/2020, Perpres 86/2018



Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Capaian Reforma Agraria per 15 Juni 2023



Reforma Agraria

Tanah Obyek Reforma Agraria

01

Legalisasi Aset 4.5 Juta Ha

Tanah Transmigrasi
Sertifikasi Hak Milik Tanah
Transmigrasi
Target: 0.6 Juta Hektar

Pendaftaran Tanah/PTSL
Pensertipikatan tanah masyarakat
secara sistematis
Target 3.9 Juta Ha

Capaian:
207.216 bidang
seluas 138.834,72 ha* (23,14%)

Capaian:
30.503.611 Bidang
seluas 9.073.017 ha** (232,64%)

02

Redistribusi Tanah 4.5 Juta Ha

**Ex-HGU, Tanah Terlantar
& Tanah Negara Lainnya**
Redistribusi Tanah Negara dari
HGU habis tidak diperpanjang,
tanah terlantar dan TN lainnya
Target 0.4 Juta Ha

Capaian:
2.069.467 bidang,
Seluas 1.330.974,73 ha***
(332,74%)

Pelepasan Kawasan Hutan
Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA
Target 4.1 Juta Ha
Sudah menjadi APL: 1.665.474 ha
a. Sudah Sertipikat: 348.732,56 ha
b. Potensi Objek Redis: 572.777,73 ha
c. Objek Bermasalah : 743.963,71 ha

Capaian:
721.458 bidang
Seluas 348.732,56 ha*** (8,51%)

Catatan Webinar Series #2 13 Juni 2023



1. Terdapat perbedaan angka realisasi capaian SHM transmigrasi antara yang disajikan **Kementerian ATR/BPN (23,14%)** dan **Kementerian Desa PDT Transmigrasi (57,22%)**
2. Terdapat usulan penerbitan penerbitan SHM Transmigrasi untuk tahun 2023 sebanyak 34.488 bidang berdasarkan Surat Kemendes PDTTrans Nomor 653/PKT.03.04/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022
3. Terdapat berbagai permasalahan dalam penerbitan SHM Transmigrasi dan telah dikelompokkan oleh Kemendes PDT Transmigrasi berdasarkan tipologi permasalahannya, berdasarkan Kemendes PDTTrans Nomor 1099/PKT.03.04/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022

Usulan Penerbitan SHM Transmigrasi tahun 2023



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI R.I.
**DIREKTORAT JENDERAL
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**
 Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19, PO BOX 70 JKS PM/KBY
 www.kemendes.go.id

Nomor : **653 /PKT.03.04/VIII/2022** 16 Agustus 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) eksemplar
 Hal : Usulan Penerbitan SHM Transmigrasi Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI
 di Tempat

Dalam rangka percepatan pencapaian target legalisasi tanah transmigrasi yang merupakan bagian dari Reforma Agraria sebagai salah satu Program Prioritas Nasional, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah menginventarisasi lokasi transmigrasi yang masih terdapat sisa beban penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi yang sudah *clean and clear* untuk usulan penerbitan SHM transmigrasi tahun 2023 yang diperoleh melalui kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian SHM transmigrasi maupun melalui surat usulan resmi dari Dinas Ketranmigrasian Provinsi dan Kabupaten.
- Berdasarkan hasil inventarisasi, Usulan Penerbitan SHM Transmigrasi Tahun 2023 sebanyak 34.488 bidang yang tersebar di 203 Lokasi, 89 Kabupaten, dan 27 Provinsi (data terlampir), untuk dapat diakomodir dalam program dan penganggaran di Kementerian ATR/BPN serta dapat masuk dalam target penerbitan SHM di Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Sekretaris Jenderal diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
 Pembangunan dan Pengembangan
 Kawasan Transmigrasi,

 Ir. Rajumber Prihatin, M.Si
 NIP. 19681206 199403 1 001

- Tembusan:**
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - Kedeputian II, Kantor Staf Presiden;
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi;
 - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN;
 - Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN;
 - Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 - Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

- 2 -

Lampiran Surat Plt. Dirjen PPKTrans
 Nomor : **653 /PKT.03.04/VIII/2022**
 Tanggal : **16 Agustus 2022**

USULAN PENERBITAN SHM TRANSMIGRASI TAHUN 2023

NO	PROVINSI	KAB	LOKASI	JUMLAH BIDANG	STATUS HPL		KET
					BINA	SERAH	
1	2	3	4	7	8	9	10
1	ACEH	8	14	2.313	835	1.478	
2	SUMATERA UTARA	2	2	260	-	260	
3	RIAU	6	26	3.356	633	2.723	
4	KEPULAUAN RIAU	2	4	1.286	-	1.286	
5	SUMATERA BARAT	2	2	311	247	64	
6	JAMBI	2	7	718	-	718	
7	BENGKULU	4	10	2.277	476	1.801	
8	SUMATERA SELATAN	10	45	5.050	120	4.930	
9	LAMPUNG	2	7	1.981	-	1.981	
10	BANGKA BELITUNG	1	3	172	-	172	
11	KALIMANTAN BARAT	5	7	2.021	75	1.946	
12	KALIMANTAN TENGAH	5	5	631	198	433	
13	KALIMANTAN SELATAN	5	13	1.037	75	962	
14	KALIMANTAN UTARA	2	3	270	123	147	
15	KALIMANTAN TIMUR	2	6	636	-	636	
16	SULAWESI UTARA	3	7	535	-	535	
17	GORONTALO	2	2	219	219	-	
18	SULAWESI TENGAH	1	1	720	-	720	
19	SULAWESI SELATAN	1	1	200	-	200	
20	SULAWESI BARAT	3	4	1.491	150	1.341	
21	SULAWESI TENGGARA	4	6	2.199	675	1.524	
22	NUSA TENGGARA BARAT	2	2	1.000	-	1.000	
23	NUSA TENGGARA TIMUR	10	17	2.823	658	2.165	
24	MALUKU	1	4	1.185	-	1.185	
25	MALUKU UTARA	1	1	525	525	-	
26	PAPUA	2	2	1.005	1.005	-	
27	PAPUA BARAT	1	2	267	-	267	
	JUMLAH	89	203	34.488	6.014	28.474	

Berdasarkan Surat
 Kemendes PDTTrans
 Nomor
653/PKT.03.04/VIII/2022
 tanggal 16 Agustus 2022,
 Kemendes PDTTrans
 mengusulkan penerbitan
 SHM Transmigrasi untuk
 tahun 2023 sebanyak
**34.488 bidang yang
 tersebar pada 203 lokasi
 dan 89 kabupaten**



@atr_bpn



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
 Badan Pertanahan Nasional



@kementerian.atrbpn



Kementerian ATR BPN

Usulan Perubahan Target Legalisasi Aset Transmigrasi



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Jalan THF, Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19, PO BOX 70 JKS PM/NDY
www.kemendes.go.id

Nomor : 1099 /PKT.03.04/XII/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Usulan Perubahan Target Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi

16 Desember 2022

**Yth. Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian PPN/Bappenas
di Tempat**

Dalam rangka usulan perubahan target legalisasi aset tanah transmigrasi sesuai target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam skema Reforma Agraria, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:


- Telah dilaksanakan rapat Evaluasi Pencapaian Target Sertifikasi Lahan Transmigrasi sesuai dengan Target Tanah Objek Reforma Agraria Tahun 2022 pada tanggal 12 September 2022 yang dihadiri oleh perwakilan pejabat dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan hasil antara lain:
 - Target legalisasi aset tanah transmigrasi sebesar 0,6 juta Ha perlu ditinjau kembali;
 - Perlu penyampaian usulan perubahan (revisi) target TORA bidang transmigrasi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Penetapan target legalisasi aset tanah transmigrasi sebesar 0,6 Juta Ha berdasarkan data pada surat Pih. Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Nomor B.813/P2KTrans/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2014, hal Penyampaian Data Rekapitulasi Permasalahan Tanah Transmigrasi, yaitu:
 - Belum dilakukan pelepasan kawasan hutan oleh Kemenhut sebanyak 398 lokasi, di 27 provinsi;
 - Belum didukung Hak Pengelolaan (HPL) tanah transmigrasi dari BPN seluas 283.587 Ha (110.406 KK) di 25 provinsi;
 - Belum terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah transmigrasi dari BPN sebanyak 350.034 bidang (256.990 KK) di 27 provinsi.Penetapan target legalisasi aset tanah transmigrasi sebesar 0,6 Juta Ha merupakan gabungan antara poin b dan c.
- Capaian penerbitan SHM transmigrasi sampai dengan bulan Desember 2022 berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian SHM Transmigrasi Tahun 2022 yaitu sebanyak 203.155 bidang (\pm 136.113,85 Ha). Terdapat sisa beban SHM sebanyak 156.631 bidang (\pm 104.942,77 Ha) yang tersebar di 653 lokasi, terdiri dari lokasi *clean and clear* sebanyak 99.944 bidang...

-2-

bidang (429 lokasi) dan lokasi transmigrasi yang terkendala penerbitan SHMnya karena masuk kawasan hutan sebanyak 26.849 bidang (102 lokasi), okupasi/sengketa dengan masyarakat sebanyak 12.619 bidang (65 lokasi), tumpang tindih dengan HGU perusahaan sebanyak 11.507 bidang (52 bidang), lahan tidak tersedia sebanyak 3.359 bidang (22 lokasi), serta kasus lain sebanyak 2.353 bidang (13 lokasi). Data tersebut dapat diunduh melalui <https://bit.ly/DataBebanSHMTransmigrasi>.

4. Sesuai poin-poin di atas, maka diusulkan perubahan target legalisasi aset tanah transmigrasi dari 0,6 Juta Ha (600.000 Ha) menjadi 0,25 Juta Ha (250.000 Ha).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. Direktur Jenderal
Pembangunan dan Pengembangan
Kawasan Transmigrasi,

Ir. Rajumbe Pratihin, M.Si
NIP. 19681206-199403 1 001

Tembusan:

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP);
- Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PPKTrans.

Berdasarkan Surat
Kemendes PDTTrans
Nomor
1099/PKT.03.04/XII/2022
tanggal 26 Desember
2022, Kemendes PDTTrans
telah mengajukan
**perubahan target 600.000
hektare menjadi 250.000
hektare kepada
Bappenas dan
mengidentifikasi
permasalahan dari sisa
tanggung lokasi
transmigrasi yang belum
terbit SHM transmigrasi**

Tindak Lanjut Perbedaan Realisasi Capaian Sertifikasi Tanah Transmigrasi

Penyebab Perbedaan Persentase Capaian Sertifikasi Tanah Transmigrasi

- Kementerian ATR/BPN melakukan perhitungan realisasi berdasarkan **target 600.000 hektare** sehingga dihasilkan angka **23,14%**, sedangkan Kemendes PDTTrans melakukan perhitungan realisasi berdasarkan beban tugas SHM 362.117 bidang sehingga dihasilkan angka **57,22%**
- Kesepakatan bahwa capaian SHM transmigrasi menggunakan data dari Kementerian Desa PDT Transmigrasi per **Juni 2023 sebesar 207.216 bidang (138.834,72 hektare)**



- Berdasarkan data Kementerian Desa PDT Transmigrasi **beban tugas SHM transmigrasi 362.117 bidang**
- Jika seluruh beban tugas SHM transmigrasi sudah selesai maka luas totalnya hanya **242.618,39 hektare**, **sedangkan target legalisasi aset tanah transmigrasi adalah 600.000 hektare**. (Konversi 1 bidang = 0,67 hektare)
- **Diperlukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait target legalisasi aset tanah transmigrasi**

Tindak Lanjut Penerbitan SHM Transmigrasi tahun 2023



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA

Jalan H. Agus Salim Nomor 58, Menteng Jakarta Pusat 10350 Telepon: (021) 31925574 email: surat@atr.bpn.go.id

Nomor : 35/500.LR.02.01/VI/2023 Jakarta, 26 Juni 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Usulan Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Transmigrasi Tahun 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
(daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 653/PKT.03.04/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Usulan Penerbitan SHM Transmigrasi Tahun 2023, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengusulkan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) transmigrasi tahun 2023 sebanyak 34.488 bidang yang tersebar di 203 lokasi di 89 kabupaten/kota;
- Sebaran lokasi yang diusulkan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) transmigrasi tahun 2023 dapat dilihat pada tautan berikut: <https://s.id/RekapitulasiUsulanSHMTransmigrasi2023>.
- Terhadap lokasi usulan penerbitan SHM transmigrasi tahun 2023 diharapkan saudara memindaklanjutnya dengan:
 - Berkoordinasi dengan dinas provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan transmigrasi dalam rangka penerbitan SHM transmigrasi;
 - Menunjuk *Person in Charge* (PIC) dari lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mempermudah pembaharuan informasi mengenai progres penerbitan SHM transmigrasi; dan
 - Melaporkan mengenai progres penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) transmigrasi tahun 2023 setiap lokasi melalui tautan <https://s.id/RekapitulasiUsulanSHMTransmigrasi2023> paling lambat tanggal 28 Juni 2023, untuk selanjutnya pelaporan progres dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu melalui tautan tersebut.

Demikian...

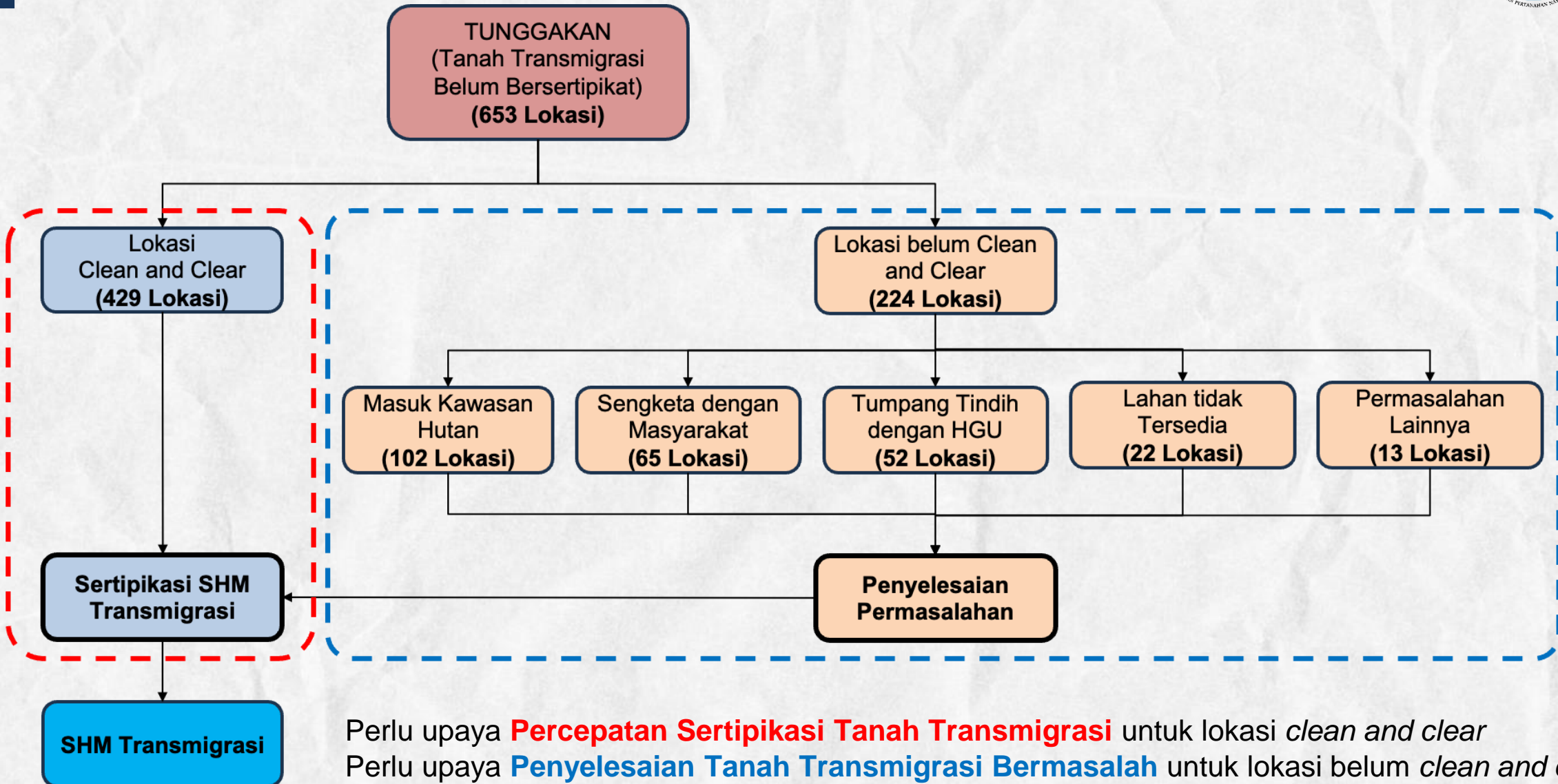
Melayan, Profesional, Terpercaya

NO	PROVINSI	KABUPATEN	LOKASI	JUMLAH BIDANG	BISA TL (SEMENTARA)	KET
1	2	3	4	7	10	11
1	ACEH	8	14	2.313	623	
2	SUMATERA UTARA	2	2	260	60	
3	RIAU	6	26	3.356	210	Mayoritas sudah realisasi
4	KEPULAUAN RIAU	2	4	1.286	247	
5	SUMATERA BARAT	2	2	311	299	
6	JAMBI	2	7	718	505	
7	BENGKULU	4	10	2.277	236	
8	SUMATERA SELATAN	10	45	5.050	117	Mayoritas realisasi 2022
9	LAMPUNG	2	7	1.981	1.214	
10	BANGKA BELITUNG	1	3	172	-	Restan
11	KALIMANTAN BARAT	5	7	2.021	-	
12	KALIMANTAN TENGAH	5	5	631	418	
13	KALIMANTAN SELATAN	5	13	1.037	50	
14	KALIMANTAN UTARA	2	3	270	431	
15	KALIMANTAN TIMUR	2	6	636	270	
16	SULAWESI UTARA	3	7	535	75	
17	GORONTALO	2	2	219	200	
18	SULAWESI TENGAH	1	1	720	700	
19	SULAWESI SELATAN	1	1	200	41	
20	SULAWESI BARAT	3	4	1.491	83	
21	SULAWESI TENGGARA	4	6	2.199	687	
22	NUSA TENGGARA BARAT	2	2	1.000	-	
23	NUSA TENGGARA TIMUR	10	17	2.823	1.868	
24	MALUKU	1	4	1.185	600	
25	MALUKU UTARA	1	1	525	-	Sebagian HPK
26	PAPUA	2	2	1.005	350	
27	PAPUA BARAT	1	2	267	151	
	JUMLAH	89	203	34.488	9.435	

Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Penataan Agraria telah bersurat kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk melaporkan tindak lanjut terhadap surat Kemendes PDTTrans Nomor 653/PKT.03.04/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, Kemendes PDTTrans mengusulkan penerbitan SHM Transmigrasi untuk tahun 2023 sebanyak 34.488 bidang

Berdasarkan telaah sementara dari usulan **34.488 bidang** yang mungkin dapat ditindaklanjuti dengan sertipikat adalah **9.435 bidang**

Tindak Lanjut Permasalahan Tanah Transmigrasi



Lokasi Transmigrasi Clean and Clear

UPT Bina

(Kewenangan
Kemendes PDDT)

UPT Serah

(Kewenangan Pemda)

Sudah HPL
Transmigrasi

Belum HPL
Transmigrasi

Sudah HPL
Transmigrasi

Belum HPL
Transmigrasi

Sertifikasi
Transmigrasi melalui
PTSL

Permohonan HPL
Transmigrasi
Ke ATR/BPN

Sertifikasi
Transmigrasi melalui
PTSL

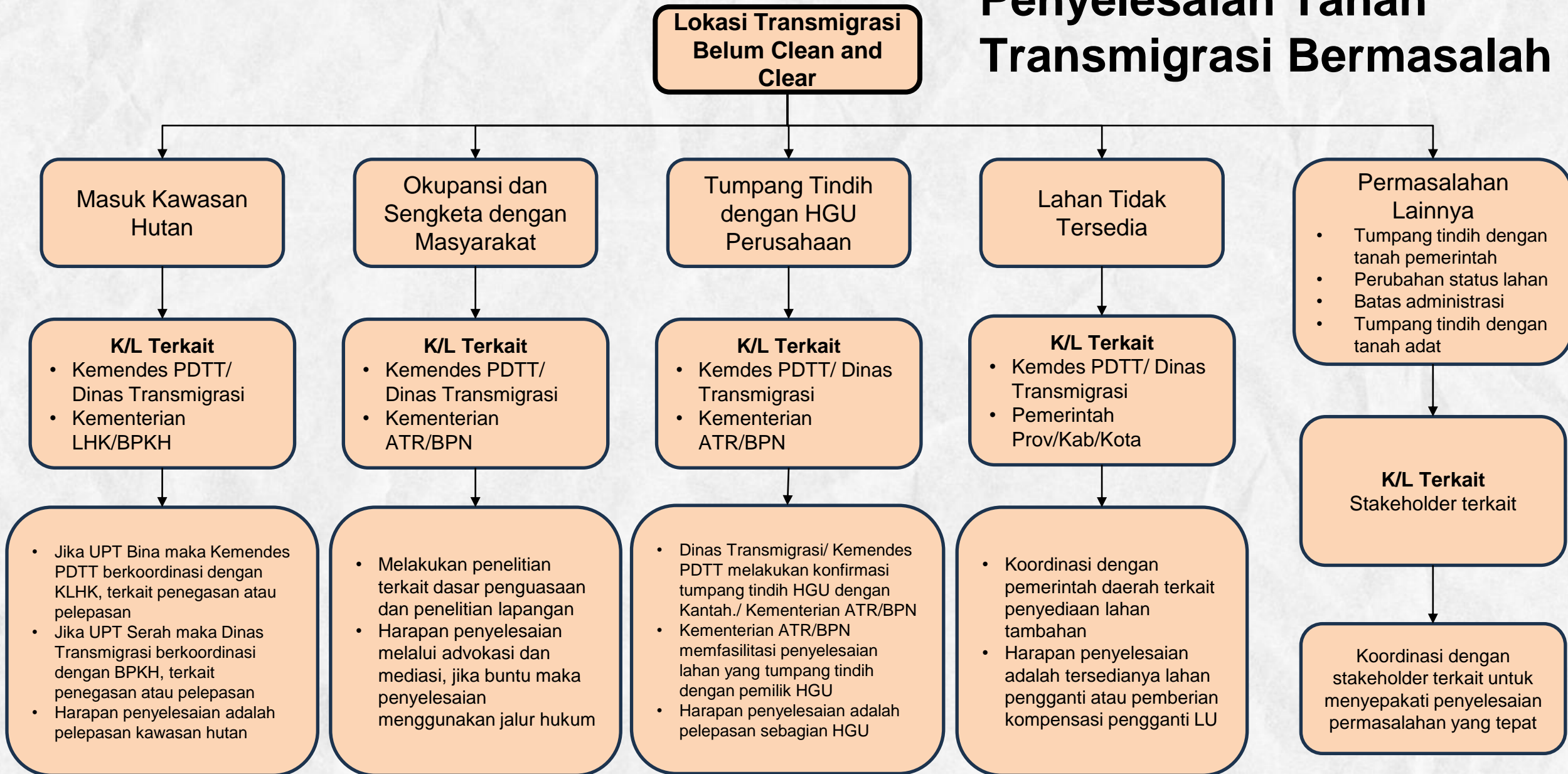
Sertifikasi melalui
**REDISTRIBUSI
TANAH**

Realisasi Capaian
SHM Transmigrasi

Percepatan Sertifikasi Tanah Transmigrasi

- Percepatan sertifikasi tanah transmigrasi melalui program PTSL dan Redistribusi Tanah
- Daftar subjek yang akan diterbitkan SHM melalui redistribusi tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota melalui Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), dimana PPL terdiri dari OPD Kabupaten/Kota
- **Diusulkan untuk adanya program sertifikasi lintas sektor agar progres sertifikasi tanah transmigrasi lebih cepat dan terpantau**

Penyelesaian Tanah Transmigrasi Bermasalah



***Perlu diperbaharui karena terdapat *update* tipologi permasalahan transmigrasi dari Kementerian Desa PDT Transmigrasi**

TERIMA
KASIH



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

